

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arafat, A. (2022). Kebijakan Publik (Teori dan Praktik). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup Kota Malang.
- Gusti, H. I. K., Sugiharto, I., & Asmarudin, I. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Dan Prancis. Penerbit NEM.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media Group Kota Depok
- Karmanis & Karjono. (2020). Studi Analisis Kebijakan Publik. CV. Pilar Nusantara.
- Malau, N. A., Kurniawan, A., Kusmendar, K., Widayati, T., Rozikin, I., Safii, M., & Adhania, L. S. O. (2024). Kebijakan Publik. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Malian, S., & AS'AD, M. U. (2021). Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum. Kreasi Total Media Yogyakarta.
- Muhaimin, M. 2020. Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.
- Poernomo, F. (2020). Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Airlangga University Press.
- Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya. Sinar Grafika.
- Rahman, F. (2018). Teori Pemerintahan. Universitas Brawijaya Press.
- Salsabila, D. T. (2020). Sumber Kewenangan Pemerintahan. Universitas Ekasakti.
- Setiawan, I. (2018). Handbook pemerintahan daerah. Wahana Resolusi.
- Sudrajat, T. (2022). Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan. Sinar Grafika.

JURNAL

- Amrianto, A. D., Putri, M. K. A., Yusup, A., & Putra, I. P. A. D. (2023). Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 123-143.
- Anindia, I. A. (dkk). 2019. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.
- Arif, A., Ariyanto, Y., & Ramani, A. (2015). Pemetaan faktor risiko terjadinya HIV dan AIDS di Kabupaten Jember tahun 2015. *Jurnal Kesehatan Masyarakat , Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember*.
- Destrio, R. Y. 2025. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mencegah Timbulnya Penyakit HIV-AIDS Pemerintah Kabupaten Jember. *Indonesian Journal of Public Administration Review: Volume 2, Number 3. Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Edotry, C. (dkk). 2024. Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum Vol 13. No. 02. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*.
- Fazry, M. (2023). Persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Korupsi. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 2(1), 28-42.
- Ikrimah, S. Fitri, I. C. 2023. Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Mengawasi Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan. *Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 1. Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Indira, I.G.A.A.I. (dkk). 2022. Pelayanan kesehatan terkait infeksi menular seksual pada lesbian, gay, biseksual, dan transgender. *Intisari Sains Medis. Vol. 13. Number 3. Departemen Dermatologi dan Venerologi, Universitas Udayana, RSUP Prof. I.G.N.G. Ngoerah, Denpasar*.
- Hermawan, E. (2019). Pengaruh Kompetensi, Pendelegasian Wewenang dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(2), 148-159.

Kamila, N. (dkk). 2021. Evaluasi Implementasi Program Voluntary Counselling And Testing Hiv/Aids Di Puskesmas Kencong. J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan Vol. 2. No. 4. Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Indonesia.

Kristiyanto, E. N. (2019). Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 1-10.

Kusumastuti, N.D. Qomarudin, H. 2023. Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia Jurnal Ilmiah Publika. VOLUME 11, NOMOR 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat.

Prihardiati, RR. L. A. 2021. Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen. <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>. Vol. 5. No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta. Indonesia.

Rachmawati, S. dkk. (2021). Pengetahuan Mahasiswa Universitas Jember Tentang HIV/AIDS. Jurnal Ilmiah Manuntung : Sains Farmasi dan Kesehatan. Fakultas Farmasi Universitas Jember. Indonesia.

Sholikha, A. C. dkk. (2021). Analisis Faktor Risiko Berhubungan Dengan Moralitas HIV/AIDS di Puskesmas Kencong Jember. J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan. Vol. 2, No. 4. Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Indonesia.

INTERNET

Andrian, K. 2024. Memahami Istilah LGBT Lebih Dalam. <https://www.alodokter.com/memahami-istilah-lgbt-lebih-dalam>. [Diakses pada 30 Januari 2025].

Ardyamarthanino, V. 2023. Kapan Prostitusi Pertama Kali Muncul di Dunia?. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/20/160000179/kapan-prostitusi-kali-pertama-muncul-di-dunia#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20Sumeria%2C%20prostitusi%20kali,pendeta%20Sumeria%20di%20Kota%20Uruk>. [Diakses pada 30 Januari 2025].

Ardyamarthanino, V. 2023. Sejarah Prostitusi di Indonesia, Terjadi Sejak Era Kolonial. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/20/140000079/sejarah-prostitusi-di-indonesia-terjadi-sejak-era-kolonial?page=all#page2>. [Diakses pada 30 Januari 2025].

Atmaja, A.R. 2024. 3 jenis Kewenangan Menurut Max Weber. <https://www.kompas.com/skola/read/2024/04/19/180000569/3-jenis-wewenang-menurut-max-weber>. [Diakses pada 13 Februari 2025].

- Cherry, K. 2023. Unsure About the LGBTQIA+ Acronym? Here's Your Glossary Guide. <https://www.verywellmind.com/what-does-lgbtq-mean-506980>. [Diakses pada 31 Januari 2025].
- Dachi, M.A. 2023. Pengertian Negara Hukum, konsep dan ciri. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>. [Diakses pada 08 Februari 2025].
- Fikriansyah, I. 2023. Apa saja ciri ciri negara hukum ? ini penjelasannya. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6714202/apa-saja-ciri-ciri-negara-hukum-ini-penjasannya>. [Diakses pada 08 Februari 2025].
- Hariyanto F. 2018. Tolak Fenomena LGBT, Mahasiswa Jember Gelar Aksi Demosntrasi. <https://bintangtenggara.net/2018/03/09/mahasiswa-jember-gelar-aksi-demosntrasi-tolak-fenomena-lgbt/>. [Diakses pada 1 Januari 2025].
- Hariyanto F. 2018. Tolak Fenomena LGBT, Mahasiswa Jember Gelar Aksi Demosntrasi. <https://bintangtenggara.net/2018/03/09/mahasiswa-jember-gelar-aksi-demosntrasi-tolak-fenomena-lgbt/>. [Diakses pada 1 Januari 2025].
- Humas. 2021. Ihwal Urusan Pemerintahan Umum. <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/>. [Diakses pada 14 Juni 2025].
- Isnanto, b.a. 2023. 3 Urusan Pemerintah Pusat: Ini Penjelasan dan Contohnya. <https://news.detik.com/berita/d-6860693/3-urusan-pemerintah-pusat-ini-penjelasan-dan-contohnya>. [Diakses pada 14 Juni 2025].
- Isabella. M.A.C. 2022. Urusan Pemerintahan Konkuren. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/20/02000041/urusanpemerintahan-konkuren>. [Diakses pada 14 Juni 2025.]
- Kemala, F. 2022. Memahami LGBT, Istilah yang Mencakup Berbagai Orientasi Seksual dan Gender. <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/apa-itu-lgbt/>. [Diakses pada 1 Januari 2025].
- Kemala, F. 2022. Memahami LGBT, Istilah yang Mencakup Berbagai Orientasi Seksual dan Gender. <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/apa-itu-lgbt/>. [Diakses pada 31 Januari 2025].
- Kumpanan.com. 2023. Pengertian Pemerintah, Fungsi, dan Tanggung Jawabnya. <https://kumpanan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-pemerintah-fungsidan-tanggung-jawabnya-21Mlatxiof6/full>. [Diakses pada 20 Januari 2025].

- Labip.ummy. 2022. Tau Gak Sih Perbedaan Negara dan Pemerintah?.
<https://labip.ummy.ac.id/tahu-nggak-sih-perbedaan-negara-dan-pemerintah/>.
[Diakses pada 20 Januari 2025].
- Liputan6.com. 2024. Kewenangan adalah Hak dan Kekuasaan yang Dimiliki untuk Melakukan Sesuatu, Pahami Konsep dan Implementasinya dalam Pemerintahan.
https://www.liputan6.com/feeds/read/5775165/kewenangan-adalah_hak-dan-kekuasaan-yang-dimiliki-untuk-melakukan-sesuatu-pahami-konsep-dan-implementasinya-dalam-pemerintahan?page=8. [Diakses pada 20 Januari 2025].
- Maulana. 2024. WADUH! Menelisik Prostitusi Gay di Jember Kian Mengancam, Selain yang Mangkal, Open BO Banyak via Medsos.
<https://radarjember.jawapos.com/jember/795116064/waduh-menelisik-prostitusi-gay-di-jember-kian-mengancam-selain-yang-mangkal-open-bo-banyak-via-medsos>. [Diakses pada 1 Januari 2025].
- Muhlisin. 2020. Dapatkah Membentuk Perwali Tanpa Perda.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-membentuk-perwali-tanpa-perintah-perda--lt5eba456911c1b/>. [Diakses pada 4 Juli 2025].
- Munawaroh, N. 2022. 5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-peraturan-daerah-lt62da5d870df68/>. [Diakses pada 4 Juli 2025].
- Nurfajrina, A. 2024. Mengenal UUD 1945 Sebagai Hukum Tertinggi Di Indonesia. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7573335/mengenal-uud-1945-sebagai-sumber-hukum-tertinggi-di-indonesia>. [Diakses pada 08 Juli 2025].
- Noorputeri, Z.Y. 2019. Sejarah Prostitusi di Dunia: Sudah Ada Sejak Ribuan Tahun Lalu. <https://kumparan.com/kumparansains/sejarah-prostitusi-di-dunia-sudah-ada-sejak-ribuan-tahun-lalu-1547079828751272918/1>.
[Diakses pada 30 Januari 2025].
- Oktaviani, V. R. 2019. Pengerian Kebijakan Dan Kebijakan Publik. https://www.google.com/search?q=Jenis+Jenis+Kebijakan+Publik&Rlz=1C1Ytuh_Idid1010Id1010&Oq=&Gs_Lcrp=Egzjahjvbwuqcqgcecmjxjqajcaaixgngooocmgkiarajgccy6giycqgcecmjxjqajjcamqixgngooocmgkibbajgccy6giycqgfecmyjxjqajjicayqixgngooocmgkibxajgccy6glsaqkyntmwajbqmtwoagiwage&Sourceid=Chrome&Ie=UTF-8. [Diakses pada 08 Februari 2025].

- Perwitasari, N.H. 2024. Apa Itu LGBTQ+ dan Penjelasan Macam-Macamnya. <https://tirto.id/apa-itu-lgbtq-singkatan-arti-macam-macam-penjelasan-grZq>. [Diakses pada 31 Januari 2025].
- Putri, V. K. M. 2022. Pengertian Pemerintahan Dalam Arti Sempit Dan Luas. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/08/093000769/pengertian-pemerintahan-dalam-arti-sempit-dan-luas>. [Diakses pada 4 Januari 2025].
- Rini, S.T. 2023. LGBT dan Kesehatan Mental. <https://sayaberani.org/lgbt-dan-kesehatan-mental/>. [Diakses pada 09 Februari 2025].
- Rini, S.T. 2023. LGBT dan Kesehatan Mental. <https://sayaberani.org/lgbt-dan-kesehatan-mental/>. [Diakses pada 09 Februari 2025].
- Saputra, Y. 2018. Sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/sejarah-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-sebagai-konstitusi-di-indonesia/>. [Diakses pada 08 Juli 2025].
- Sharon Grace. 2021. Teori Kewenangan Dalam Perizinan. <https://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/download/2249/184/>. [Diakses pada 13 Februari 2025].
- Sisma, A.F. 2023. Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum. <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. [Diakses pada 15 Februari 2025].
- Wahyuni, W. 2022. Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>. [Diakses pada 07 Februari 2025].
- Wahyuni, W. 2022. Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>. [Diakses pada 15 Februari 2025].
- Waluyo, A. G. R. 2025. Mengenal Hukum Prostitusi di Indonesia. <https://www.askara.co/read/2022/10/26/31654/mengenal-hukum-prostitusi-di-indonesia>. [Diakses pada 14 Juni 2025].

PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020
Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022
Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus,
Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS.

